
**PERAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DALAM
MENSOSIALISASIKAN ALAT KONTRASEPSI
(Studi Di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)**

Evi Setyowati
Arsiyah
Ahmad Riyadh Umar Balahmar

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
Email: evisetowati@yahoo.co.id, email: Arsiyaharsy@yahoo.com,
Riyadhadvokat@yahoo.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan peran petugas lapangan keluarga berencana dan pembantu pembina keluarga berencana desa dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PLKB dan PPKBD telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan, akan tetapi ada beberapa pegawai yang daya tanggapnya lambat, pembagian wilayah yang tidak sesuai aturan karena sedikitnya jumlah petugas, dan adanya rangkap jabatan, sehingga penyampaian informasi ke masyarakat mengalami kendala. Petugas yang sedikit diakibatkan adanya pegawai yang pensiun karena faktor usia dan adanya sistem moratorium serta tidak ada perekrutan kembali.

Kata kunci: akses informasi, kontrasepsi, peran, sumber daya manusia

***THE ROLE OF FAMILY PLANNING FIELD WORKERS AND
SUPERVISORS MAID VILLAGE FAMILY PLANNING
(The Studies in Kebonagung Village Subdistrict Sukodono District Sidoarjo)***

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the role of Family Planning and Vice builder Family Planning Villages in disseminating contraceptives in the village of the District Kebonagung Sukodono and constraints faced in the field. This study uses data source in the form of primary data and secondary data, data collection techniques by observation, interview and documentation. While the data analysis techniques used in this research is descriptive analysis with qualitative approach that includes: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results indicate of this study that the role of PLKB and PPKBD have been performing their duties and functions in accordance with the rules, but there are some employees that the power of a response is slow, zoning does not fit the rules due to the small number of officers, and their dual position. So that the delivery of information to the public to experience problems. At least the officer due to their employees who retired due to age and system of recruitment moratorium and that no return.

Keywords: access to information, contraceptive, roles, human resources

PENDAHULUAN

Desa menurut Tjokroamidjojo (1997:138) adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI. Sehingga penduduk (Sulistyawati, 2011:1) adalah semua orang yang mendiami suatu daerah selama suatu waktu atau jangka waktu tertentu, dengan kata lain semua orang yang berdomisili disuatu wilayah geografis selama enam bulan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Dengan tujuan menetap maka akan terjadi pertumbuhan penduduk yang menciptakan keluarga baru yang dapat menumbuhkan kelahiran anak. Pertumbuhan penduduk menurut Hartanto (2015 : 13) adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Sehingga pertumbuhan penduduk disebabkan tidak hanya dengan kelahiran anak tetapi kematian dan adanya migrasi penduduk juga menjadi penyebab sebagai pertumbuhan penduduk.

Pada tahun 1970, pemerintah merancang program Keluarga Berencana menjadi program nasional. Sumarjati Aryoso kepala BKKBN keenam dalam Gemari (2010:25) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program KB sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk jangan sampai mengendor. Adapun kegiatan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yaitu program pemberdayaan keluarga, program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, program kesehatan remaja dan program peningkatan jejaring dan kelembagaan keluarga berencana. Dalam program ini keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi sangat dibutuhkan demi menjamin keberhasilan program KB ini. Sehingga peran pemerintah untuk mensosialisasikan program ini juga sangat penting untuk dapat dilakukan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan sistem informasi di dalam keluarga sangat penting untuk menambah pengetahuan setiap pasangan usia subur. Dalam PP Nomor 87 Tahun 2014 pasal 1 bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat jumlah penduduk di Desa Kebonagung yang setiap tahunnya meningkat maka adapun data jumlah penduduk seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Peningkatan Penduduk

No.	Keterangan	Tahun	Sub Jumlah	Jumlah
1	Laki-Laki	2012	5.801	11.502
	Perempuan		5.701	
2	Laki-Laki	2013	5.844	11.594
	Perempuan		5.750	
3	Laki-Laki	2014	5.896	11.690
	Perempuan		5.794	
4	Laki-Laki	2015	5.890	11.700
	Perempuan		5.810	
5	Laki-Laki	2016 Bulan Februari	6.914	13.251
	Perempuan		6.337	

Sumber: Laporan Kependudukan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (2012-2016)

Berdasarkan data pada tabel 1. jumlah penduduk Desa Kebonagung mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik laki-laki maupun perempuan. Dapat dilihat di tahun 2012 dengan jumlah 11.502 orang, tahun 2013 dengan jumlah 11.594 orang, tahun 2014 dengan jumlah 11.690 orang, tahun 2015 dengan jumlah 11.700 orang, dan tahun 2016 pada bulan Februari dengan jumlah 13.251 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Desa Kebonagung terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Kebonagung, Dusun Bogem dan Dusun Saimbang. Peningkatan penduduk juga diimbangi dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Bukan KB Aktif Desa Kebonagung

No.	Tahun	Jumlah Peserta KB aktif	Tidak KB	Jumlah PUS
1	2014	1887	580	2467
2	2015	1878	686	2564
3	2016 (Bulan	1906	665	2571

Sumber : Data PLKB Desa Kebonagung di Kecamatan Sukodono (2012-2016)

Tabel 2. bahwa jumlah peserta KB aktif semakin tahun mengalami peningkatan. Sehingga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini ditunjukkan dalam angka di tahun 2014 jumlah peserta KB aktif dan tidak KB sebanyak 2467 pasangan, pada tahun 2015 jumlah peserta KB aktif dan tidak KB sebanyak 2564 pasangan dan pada tahun 2016 bulan Maret jumlah peserta KB aktif dan tidak KB sebanyak 2571 pasangan di Desa Kebonagung.

Peningkatan jumlah penduduk selain dari faktor kelahiran juga dipengaruhi jumlah pendatang baru yang bertambah disetiap tahunnya. Pendatang baru ada karena faktor ekonomi, dan pendidikan yang mengakibatkan mereka harus mencari pekerjaan dari desa ke kota. Berdasarkan data di lapangan bahwa jumlah pendatang baru setiap tahunnya bertambah yaitu tahun 2012 sebanyak 21 pendatang baru, tahun 2013 sebanyak 21 pendatang baru, tahun 2014 sebanyak 6 pendatang baru, tahun 2015 sebanyak 10 pendatang baru dan tahun 2016 bulan Februari sebanyak 4 pendatang baru dari jumlah 62 pendatang baru. Adanya peningkatan pendatang baru disebabkan oleh mudahnya akses desa yang strategis, banyaknya kos-kosan dan banyaknya jumlah perumahan.

Berdasarkan peneliti ketahui di lapangan bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Kebonagung tahun 2016 sebanyak 3646 kepala keluarga dengan jumlah anak 5776 sehingga jika dirata-rata jumlah anak dalam satu keluarga adalah 1 hingga 2 anak. Maka dapat disimpulkan bahwa program KB di Desa Kebonagung berhasil dan dapat dijadikan panutan untuk keberhasilan program KB di desa lainnya. Dengan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

berjumlah 6 orang untuk 19 desa. Sedangkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) hanya berjumlah 1 orang untuk Desa Kebonagung.

Bentuk kerjasama yang cukup baik dilakukan PLKB dengan PPKBD di desa dengan wujud kegiatannya terdiri dari melaksanakan kegiatan, mengelolah data kependudukan, menggerakkan PPKBD, memberdayakan masyarakat, dan menggalang masyarakat serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program-program KB yang ada. Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas maka judul dalam penulisan penelitian ini adalah “Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dalam Mensosialisasikan Alat Kotrasepsi (Studi Di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitiannya antara lain untuk mendiskripsikan peran petugas lapangan keluarga berencana dan pembantu pembina keluarga berencana desa serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas penyuluh lapangan keluarga berencana dan pembantu pembina keluarga berencana desa dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi studi di Desa Kebonagung.

LANDASAN TEORETIS

Peran Petuga Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

PLKB atau PPKBD dapat menjadi penyedia fasilitas khususnya tentang fasilitas Keluarga Berencana yang terdiri dari tempat, obat-obatan, dan alat peraga edukasi kontrasepsi. Sedangkan penerima layanan terdiri dari masyarakat yang merupakan Pasangan Usia Subur/ PUS dan Wanita Usia Subur/ WUS. Terdapat ruang lingkup peran yang digolongkan pada tiga hal menurut Shaleh (1977 : 47) yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dimasyarakat.

Dalam peran PLKB juga terdapat tugas tambahan yang merupakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina lingkungan keluarga (BKKBN, 2004). Sedangkan Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif dalam melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat dusun RT/RW yang setara (BKKBN, 2009:1).

Petugas lapangan keluarga berencana dan pembantu pembina keluarga berencana desa termasuk dalam kelompok jabatan fungsional didalam struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana (BPMPKB) peraturan daerah nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoodinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Sosialisasi dan Alat Kontrasepsi

Peranan PLKB dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi dilakukan kepada PPKBD selama satu bulan sekali, kemudian dilanjutkan PPKBD kemasyarakat. Sehingga kegiatan sosialisasi di Desa Kebonagung telah dilakukan secara terjadwal dengan pendekatan secara langsung kemasyarakat. Adapun tujuan-tujuan dari adanya sosialisasi menurut Cohen dkk (1992) yaitu sebagai berikut agar dapat memiliki bekal ketrampilan yang nantinya akan dibutuhkan untuk tetap hidup, agar individu dapat berkomunikasi dengan baik sehingga kemampuan membaca, menulis dan berbicara dapat berkembang, untuk mengendalikan fungsi organik melalui pemberian pelatihan mawas diri yang tepat, agar dapat membiasakan dirinya dalam nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat, dapat membentuk perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya yaitu bagaimana memberikan reaksi terhadap suatu pengalaman menuju proses pendewasaan.

Sebagian masyarakat khususnya wanita telah menggunakan alat kontrasepsi sehingga tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat, akan tetapi pengguna kontrasepsi pria masih rendah. Dalam memilih kontrasepsi selain memperhatikan syarat dan faktor penggunaannya maka didalam Pasal 27 ayat 3 (Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2014) berisikan tentang jenis alat, obat dan atau cara kontrasepsi sebagaimana ditetapkan dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Daya guna dan hasil guna sehingga tidak berdampak negatif terhadap pengguna.
 - b. Risiko terhadap kesehatan harus diperhatikan agar dapat menjaga kesehatan reproduksi.
 - c. Nilai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
-

Dengan memperhatikan perihal tersebut maka kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk dijaga. Adapun macam-macam jenis alat kontrasepsi sebagai berikut :

- a. Alat kontrasepsi pil dibagi menjadi 2 (dua) macam (Saifuddin dkk, 2011 : MK29) yaitu :
 1. Pil Kombinasi.
 2. Pil Progestin.
- b. Alat kontrasepsi suntik
- c. Alat kontrasepsi implant/susuk
- d. Kondom
- e. Media Operasi Wanita (MOW)
- f. Media Operasi Pria (MOP) Vasektomi
- g. Pasangan Usia Subur (PUS) Unmet-Need

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran oleh petugas lapangan keluarga berencana dan pembantu pembina keluarga berencana desa dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi serta kendala yang dihadapi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini pertama data primer yang mendapatkan informasi dari 8 orang yang terdiri key informan yaitu Sub. bid KB & KS dengan bapak Drs. Miftakhul Arif, informan yang terdiri koodinator PLKB dengan bapak Agus Widodo, PLKB dengan ibu Kantiharti, PPKBD dengan ibu endang, masyarakat yang terdiri PUS yaitu Saikuna, Ismiatin, dan Rizki dan WUS dengan Surya Eka Puspitasari, catatan hasil observasi tentang kondisi dan kejadian yang ditemui selama dilapangan dan catatan hasil wawancara. Kedua yaitu data sekunder yang terdiri dari berupa buku panduan kinerja program Keluarga Berencana, jadwal sosialisasi selama setahun ataupun selama satu bulan, arsip-arsip yang dimiliki Petugas Lapangan KB dan PPKBD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PLKB dan PPKBD dalam Mensosialisasikan Alat Kontrasepsi

Keluarga yang berkualitas di Desa Kebonagung diwujudkan melalui program Keluarga Berencana, khususnya juga dalam memahami pentingnya penggunaan kontrasepsi agar terhindar dari berbagai penyakit dan juga mewujudkan memiliki jumlah anak ideal yaitu 2 anak cukup. Oleh sebab itu,

diperlukan adanya petugas-petugas lapangan yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada berikut pernyataannya :

“Memang sudah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada bidang KB & KS, Akan tetapi jika terdapat kegiatan lainnya di kecamatan maka PLKB berhak membantu kegiatan tersebut.” (Wawancara dengan Kood. PLKB, 20 April 2016)

Sehingga dapat disimpulkan penulis bahwa tugas-tugas dan fungsi PLKB dikecamatan sudah tentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada sub bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terdapat penambahan tugas jika dikemudian hari ada kegiatan diluar tugas PLKB dilingkungan Kecamatan. Mengingat tugas PLKB yang begitu banyak apakah terdapat pembinaan ataupun sosialisasi kepada PLKB, berikut hasil wawancanya, “Telah dilakukan pembinaan kepada PLKB selama 7 kali dalam 1 (satu) tahun guna untuk memperbarui informasi yang terbaru kepada koodinator PLKB.” (Wawancara dengan Sub Bid. KB & KS, 20 April 2016)

Dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pembinaan kepada Koodinator PLKB sebanyak 7 kali dalam satu tahun. Yang mana setelah itu akan dilakukan pembinaan berkelanjutan dari PLKB ke setiap PPKBD yang kemudian dilanjutkan ke Sub PPKBD agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Mengingat adanya peran PLKB dan PPKBD dimasyarakat tersebut maka dapat dipadukan dengan teori peran (menurut Suharto, 2011:154) yaitu dimana sekumpulan kegiatan dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama antara sebagai penyedia fasilitas dan sebagai penerima layanan. Maka adapun peran PLKB sebagai penyedia fasilitas seperti yang peneliti ketahui dilapangan :

- a. Memberikan pembinaan dan sosialisasi secara terjadwal telah dilakukan akan tetapi pemahaman PPKBD lambat dalam penerimaan informasi.
- b. Adanya tempat sebagai perkumpulan antar PPKBD dan sebagai tempat rapat ataupun sosialisasi walaupun tempatnya berada di Kecamatan.

Sedangkan peran PPKBD sebagai penyedia fasilitas didesa yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya tempat sebagai perkumpulan antar Sub PPKBD dan sebagai tempat layanan seperti posyandu, pos lansia dan perkumpulan PKK walaupun tempatnya berada di rumah PPKBD.
 2. Memberikan sosialisasi secara terjadwal telah dilakukan akan tetapi partisipasi masyarakat kurang mendukung.
 3. Perlu adanya meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) agar dapat lebih inovasi dan terampil dalam berkomunikasi.
-

4. Kurang meratanya informasi terbaru tentang kegiatan baik safari tahunan (adanya KB serentak dalam kegiatan hari Keluarga, HUT Kopri, hari jadi Kabupaten Sidoarjo, HUT Dharma Wanita, peringatan hari Kartini dst.) serta memberikan informasi kontrasepsi bagi PUS yang baru melahirkan.

Berdasarkan teori peran diatas maka terdapat penerima layanan dari PLKB dan PPKBD yaitu masyarakat yang terdiri dari :

- a. Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdiri dari suami istri yang masih dalam usia reproduksi yaitu sekitar usia 20 tahun sampai dengan 55 tahun sesuai dengan kondisi kesehatan individu.
- b. Wanita Usia Subur (WUS) yang terdiri dari wanita usia remaja sekitar 9 tahun sampai dengan 55 tahun.

Faktor kendala yang dihadapi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kebonagung

Berdasarkan peneliti ketahui dilapangan bahwa terdapat ketidaksesuaian pembagian wilayah pada pegawai PLKB dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Ini merupakan salah satu faktor terjadinya kendala dilapangan yang mana PLKB harus membawahi lebih dari 2 (dua) desa disetiap kecamatan, Bagaimana hal tersebut terjadi sehingga tidak sesuai dengan aturan. Hal yang sama terdapat pada hasil wawancara berikut ini :

“Idealnya memang setiap PLKB membawahi 2 desa disetiap kecamatan akan tetapi karena pembagian PLKB yang tidak merata dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan tidak dapat dilakukan perekrutan karena adanya sistem moratorium sehingga setiap PLKB harus membawahi 3 sampai 4 desa.” (Wawancara dengan Sub Bid. KB & KS, pada hari Senin, 11 April 2016)

Berdasarkan hasil yang peneliti ketahui dilapangan bahwa pembagian wilayah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam tupoksi. Hal tersebut disebabkan karena sedikitnya jumlah PLKB dikabupaten sidoarjo yaitu sebanyak 102 petugas. Di kecamatan sukodono yang memiliki 19 desa hanya terdapat 6 petugas PLKB. Sehingga setiap petugas membawahi 3 desa, maka pembagian wilayah di Kecamatan Sukodono tidak sesuai dengan tupoksi karena idealnya 1 petugas membawahi 1 hingga 2 desa saja. Selain itu setiap tahunnya terdapat PLKB yang pensiun dan tidak dapat dilakukan perekrutan karena adanya sistem moratorium dari pusat. Selain perihal tersebut juga terdapat kendala lainnya yaitu tingkat pemahaman seseorang bergantung pada pola pikir dan latar belakang pendidikan yang dapat berpengaruh dalam penyampaian yang berkelanjutan. Mengenai hal tersebut maka bagaimana respon Koodinator PLKB hingga PPKBD di Desa Kebonagung. Hal yang sama terdapat pada pernyataan berikut ini:

“Ketika ada pembinaan, respon dari koodinator PLKB cukup baik dan partisipasinya cukup banyak hal tersebut terjadi karena adanya ikatan kerja karena terdapat penilaian kinerja sehingga koodinator PLKB selalu menjalankan tugasnya. Untuk PPKBD kendala yang dihadapi karena adanya rangkap jabatan sehingga dalam menyelesaikan tugasnya menjadi tidak fokus. Selain itu SDM yang kurang serta insentif yang diberikan kepada PPKBD sangat sedikit yaitu hanya Rp.167.000 pertahunnya.” (Wawancara dengan Sub Bid. KB & KS, 20 April 2016)

Sedangkan untuk PPKBD terdapat rangkap jabatan yang mengakibatkan terhambatnya kinerja petugas dan insentif yang sedikit juga berpengaruh terhadap hasil kinerja petugas. Adapun hasil wawancara yang dapat menghambat kinerja petugas sebagai berikut :

“Respon PPKBD dalam menanggapi setiap pembinaan yang diberikan oleh PLKB cukup baik akan tetapi ada beberapa yang masih lambat dalam menangkap informasi yang diberikan selain itu masyarakat juga didominasi dengan sifat agamis sehingga kalau di arahkan kekontrasepsi mantap itu sulit. Biasane juga PUS yang baru melahirkan kalo minta diantar ikut KB mandiri atau KB mantap mereka kesini mbak soalnya tidak mungkin juga kalo saya datangi satu-satu waktunya itu terbatas mbak terkadang juga pernah saya kunjungi kerumah tapi tidak semua.” (Wawancara dengan PLKB, 8 Juni 2016)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan permasalahan yang sama bahwa penerimaan informasi ataupun pembinaan yang diberikan oleh BPMPKB dibidang KB & KS mendapat respon yang cukup baik karena koodinator PLKB menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban selain itu juga pendidikan yang dimiliki oleh koodinator yang cukup tinggi juga berpengaruh pada penerimaan informasi. Sedangkan pemberian informasi ataupun pembinaan pada PPKBD ada kendala karena lambat dalam penangkapan informasi dikarenakan latar belakang pendidikan yang hanya SLTA dan pola pikir masyarakat yang cenderung agamis sehingga sulit untuk diarahkan ke kontrasepsi mantap.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa menghadapi masyarakat tidak selamanya lancar, aman dan terkendali ada kalanya PLKB dan PPKBD juga mengalami kendala didalamnya, adapun kendala yang dihadapi PLKB di lapangan yaitu :

- a. Banyaknya tugas yang dibebankan dan minimnya jumlah PLKB diluar tupoksi yang seharusnya.
- b. Kurangnya sarana-prasarana yang menunjang kinerja PLKB.
- c. Tidak adanya alat edukasi dan alat penunjang lainnya, bahan, serta obat-obatan yang dapat menunjang pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi khususnya tentang informasi kontrasepsi karena kegiatan KIE terdapat di Puskesmas.
- d. Kurangnya inovasi dalam penyampaian informasi sehingga berpengaruh dalam penerimaan pemahaman informasi.

Selain kendala yang dihadapi oleh PLKB, terdapat juga kendala yang dihadapi oleh PPKBD yaitu :

- a. Kurangnya tingkat pemahaman tiap individu dalam menerima kesimpulan disetiap pembinaan/penyuluhan/sosialisasi yang diberikan PPKBD.
- b. Kurangnya sarana-prasarana yang menunjang kinerja PPKBD.
- c. Sedikitnya insentif/honor yang diberikan kepada PPKBD setiap tahunnya.
- d. Kurangnya inovasi dalam sosialisasi ataupun memberikan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Adanya sebagian masyarakat yang bersifat agamis yang susah untuk diarahkan.
- f. Adanya rangkap jabatan yang diperoleh PPKBD seperti selain menjadi PPKBD mereka juga mejadi petugas PKK, POSYANDU, dan Pos Lansia.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Peran petugas lapangan keluarga berencana sebagai Penyedia Fasilitas di Kecamatan Sukodono adalah Memberikan pembinaan dan sosialisasi secara terjadwal, dan tempat rapat ataupun sosialisasi walaupun tempatnya berada di Kecamatan. Sedangkan peran pembantu pembina keluarga berencana desa yaitu menyediakan tempat sebagai tempat layanan seperti posyandu, pos lansia dan perkumpulan PKK tempatnya berada di rumah pembantu pembina keluarga berencana desa, dan memberikan sosialisasi secara terjadwal.
 - b. Kendala yang dihadapi petugas lapangan keluarga berencana di lapangan adalah banyaknya tugas yang dibebankan dan minimnya jumlah petugas lapangan keluarga berencana diluar tupoksi yang seharusnya, kurangnya sarana-prasarana yang menunjang kinerja pembantu pembina keluarga berencana desa. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pembantu pembina keluarga berencana desa yaitu kurangnya tingkat pemahaman tiap individu dalam menerima kesimpulan disetiap pembinaan/ sosialisasi yang diberikan pembantu pembina keluarga berencana desa, sedikitnya insentif/honor yang
-

diberikan kepada pembantu pembina keluarga berencana desa setiap tahunnya, kurangnya inovasi dalam sosialisasi ataupun memberikan pembinaan kepada masyarakat, adanya masyarakat yang bersifat agamis yang susah untuk diarahkan, adanya rangkap jabatan yang diperoleh pembantu pembina keluarga berencana desa seperti selain menjadi pembantu pembina keluarga berencana desa mereka juga mejadi petugas PKK, Posyandu, dan Pos Lansia.

2. Saran

- a. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) sudah baik supaya ditingkatkan namun harus ada penambahan petugas lapangan keluarga berencana, perlu adanya pengurangan tugas kepada petugas lapangan keluarga berencana karena akan ada tugas mendadak jika dikecamatan ataupun desa mengadakan kegiatan dan perlu adanya penambahan sarana-prasarana untuk meningkatkan hasil kinerja.
- b. Perlu adanya peningkatan insentif kepada pembantu pembina keluarga berencana desa mengingat adanya rangkap jabatan yang dijalani dan perlu adanya penambahan sarana-prasarana agar dapat menunjang pencapaian kinerjanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. (2004). *Istilah dan Pengertian*. Jakarta
- . (2009). *Istilah dan Pengertian*. Jakarta.
- Cohen, Bruce J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gemari, (2010). *Keseriusan Indonesia Capai Target MDGs*. Ed. 117/XI/2010 Hartanto, Hanafi. (2015). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laporan Kependudukan Bagian Tribulan IV Tahun 2012 hingga tahun 2016 bulan Februari. Kecamatan Sukodono
- Laporan peserta aktif KB dan Unmet-Need PLKB tahun 2014-2016 bulan Maret. Kecamatan Sukodono.
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.
- Saifuddin, Abdul Bari dkk. (2011). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Shaleh, A Rosyid. (1977). *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Suharto, Edi. 2011. *Pekerjaan Sosial Di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
-

- Sulistyawati. (2011). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1997). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Jagung.
- Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

